



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ADE JAHRAN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 629343

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 359.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 58.500.000
3. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.700.000
4. Tanah Seluas 451 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 653 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 899 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 7.000.000

1. MOBIL, AGYA MANUAL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 4.400.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 12.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 382.600.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 382.600.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FIERLY MURDLYAT MABRURRI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 664912

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	820.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	13.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY C1C02N16M2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	18.940.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	5.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	856.940.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	50.500.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	806.440.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NANAS NASIHUDIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 669860

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	47.300.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/60 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 47.300.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	21.005.000
1. MOTOR, HONDA METIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 21.005.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	252.852
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	68.557.852
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	68.557.852

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PATRUDIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 637371

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	155.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
130.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
5.000.000		
3. LAINNYA, SEPEDAH UNITED DETROID (M) Tahun 2020, HASIL		
SENDIRI Rp. 2.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	
18.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	449.864
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	155.449.864
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	155.449.864

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : M. FAHMI MUSYAFA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 629349

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	7.000.000
1. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	
7.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	3.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	----
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	50.000.000
<b>Sub Total</b>	Rp.	60.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	60.000.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HENDRO SULISTYO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 832155

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	220.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HADIAH Rp. 220.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	89.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	21.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	3.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	333.000.000

<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	333.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.





3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

